

***PUBLIC SPHERE* DAN POLITIK PROTES GENDER:
TRANSFORMASI GERAKAN FEMINISME ERA PRESIDEN
MANSOUR HADI**



Oleh:
Anisa Isdiyanti
NIM: 20200011126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar *Master of Arts*
(M.A.)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Kajian Timur Tengah

YOGYAKARTA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Isdiyanti
NIM : 20200011126
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Anisa Isdiyanti
NIM: 20200011126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Isdiyanti
NIM : 20200011126
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya siap ditindak
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Anisa Isdiyanti
NIM: 20200011126



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-499/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : Public Sphere dan Politik Protes Gender: Transformasi Gerakan Feminisme Era Presiden Manshour Hadi

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA ISDIYANTI, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011126
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 64829c8e9733c



Penguji II

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64810f43becf0



Penguji III

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 64826d32ef5a3



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. II. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6482e162d00bd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **PUBLIC SPHERE DAN POLITIK PROTES GENDER: TRANSFORMASI GERAKAN FEMINISME ERA PRESIDEN MANSHOUR HADI**

Yang ditulis oleh :

Nama : Anisa Isdiyanti
NIM : 20200011126
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Ita Rodiah, M.Hum
NIP: 19840202 201903 2 009

MOTTO

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.” - Vincent van Gogh –



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk diri sendiri, kedua orang tua tercinta, bapak Hiu Iswahyudi dan ibu Sri Daryanti, serta suami tercinta Heri Setiyawan.

Terima kasih untuk setiap doa, pengorbanan, dan dukungannya.



Abstrak

Anisa Isdiyanti. 20200011126. (2020). *Public Sphere dan Politik Protes Gender: Transformasi Gerakan Feminisme Era Presiden Manshour Hadi*. Tesis, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana, Univeristas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yaman salah satu negara konservatif yang terdapat banyak bias gender dalam hal hak perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, Yaman tergolong negara yang miskin di Timur Tengah serta tak lepas dari konflik, baik konflik etnis ataupun agama. Perempuan Yaman menjadi tidak berdaya akibat otoritas keagamaan dan struktur sosial yang represif sehingga perempuan Yaman menerima ketidakadilan dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat. Hal tersebut menyebabkan peran perempuan di Yaman termarginalisasi dalam ruang politik, ekonomi, dan sosial.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mengkaji munculnya politik protes gender di ruang publik Yaman pada masa pemerintahan Manshour Hadi dari 2012 sampai 2020. Pendekatan *public sphere* Jürgen Habermas dalam konteks ruang publik memiliki peran yang penting dalam demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk bertemu, berkomunikasi, dan membuat keputusan bersama, serta mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian, pendekatan gerakan gender dengan konsep politik kesalehan perempuan Saba Mahmood tentang agama dan kebebasan, kapitalisme serta liberalisme dalam konflik kontemporer di Timur Tengah digunakan untuk memahami sebuah gerakan perempuan Yaman hadir di ruang publik menyuarakan kesetaraan gender. Selain itu pendekatan feminisme marxis sosialis Juliet Mitchell tentang kapitalisme dan patriarki digunakan untuk menelaah adanya pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki serta pemisahan antara laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia domestik. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur.

Hasil riset yang didapatkan mengungkapkan bahwasanya upaya pemberdayaan perempuan di Yaman menemui berbagai kendala yang disebabkan kurangnya kapasitas pemimpin perempuan, ketidakstabilan politik, dan ekonomi serta kurangnya budaya dukungan politik. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa kultur patriarki yang kuat melekat terhadap dogma-dogma agama menjadi tolok ukur kegagalan pemberdayaan perempuan Yaman. Secara politik, ada upaya pemerintah Yaman dalam mendukung strategi pemberdayaan perempuan guna mencapai kesetaraan gender (*gender equality*), namun secara sosial, masyarakat terutama tokoh-tokoh tradisional tidak mendukung dengan adanya strategi pemberdayaan *gender equality*.

Kata kunci: *Public Sphere*, Politik Protes, Gender, Feminisme , Yaman.

Abstrack

Yemen is a conservative country where there are many gender biases in terms of women's rights in the fields of education, health, and the economy. In addition, Yemen is classified as a poor country in the Middle East and is not free from conflict, both ethnic and religious. Yemeni women become powerless due to religious authority and repressive social structures, so they accept injustice in their position as part of society. This causes the role of women in Yemen to be marginalized in the political, economic, and social spaces.

This study aims to explore and examine the emergence of the politics of gender protest in the Yemeni public space during the reign of Manshour Hadi from 2012 to 2020. Jürgen Habermas's public sphere approach in the context of public space has an important role in democracy because it allows citizens to meet, communicate, and make collective decisions, as well as influence public policy. Then, the approach of the gender movement with the political concept of women's piety Saba Mahmood's views on religion and freedom, capitalism, and liberalism in contemporary conflicts in the Middle East are used to understand a Yemeni women's movement present in the public space voicing gender equality. In addition, Juliet Mitchell's socialist-Marxist feminism approach to capitalism and patriarchy is used to examine the division of labor between women and men and the separation between men in the public world and women in the domestic world. The method used is a qualitative method with a literature study data collection technique.

The research results obtained revealed that efforts to empower women in Yemen encountered various obstacles due to a lack of capacity among women leaders, political and economic instability, and a lack of a culture of political support. In this study, the authors found that a strong patriarchal culture attached to religious dogmas became a benchmark for the failure of Yemeni women's empowerment. Politically, there are efforts by the Yemeni government to support the women's empowerment strategy to achieve gender equality, but socially, the community, especially traditional figures, do not support the existence of a gender equality empowerment strategy.

Key Words: Public Sphere, Politics of Protest, Gender, Feminism , Yemen.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Public Sphere dan Politik Protes Gender: Transformasi Gerakan Feminisme Era Presiden Manshour Hadi”**

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada khotimul ambiya' sayyidina Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat manusia yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari pelbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku ketua Prodi Magister *Interdisciplinary Islamic Studies*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada dosen pembimbing terbaik, Ibu Dr. Ita Rodiah M.Hum yang telah membimbing, memberi saran terkait penelitian dan kepenulisan, serta menyediakan waktu konsultasi dengan penuh ketelatenan dan kesabaran pada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik pula.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitasi akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis, yang kelak akan menjadi bekal penulis di masyarakat.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta bapak Hiu Iswahyudi, S.Pd dan ibu Sri Daryanti yang berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepada anak-anaknya.

7. Teruntuk Heri Setiyawan, S.Sos yang senantiasa ada disamping penulis untuk memberikan dukungan dan semangat.
8. Teruntuk teman-teman Kajian Timur Tengah angkatan 2020; Ayu Maulida Al-Kholiq, Adnan Adwitama, Anna Zakiyah Derajat, Idha Ismalia Rohmatika, Khotibul Umam serta Nur Fahmi, yang selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain.
9. Teruntuk ketiga adik penulis; Anita Ismaulida, Anida Istiandari serta Azhar Iswara.
10. Teruntuk miss Laili Purnama Sari CEO Laili Brand dan miss Aniyatuz Zakiyah yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk senantiasa memperbaiki diri dan mengajarkan agar memberikan arti yang luas dalam hidup ini bagi orang-orang tercinta.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Penulis

Anisa Isdiyanti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: SITUASI POLITIK YAMAN PASCA-ARAB SPRING	27
A. Pendahuluan	27

B. Masa Transisi Pemerintahan dan Bentuk Strategi Protes Politik Gender di Ruang Publik	28
1. Gerakan Protes terhadap Permasalahan di Yaman	31
2. Tawakkul Karman <i>Founding Mother</i> Lembaga <i>Women Journalist Without Chains</i>	32
C. Proletariat Sibernetika (<i>Cybernetic Proletariat</i>) dalam Platform Media Sosial Gerakan Feminisme	33
1. <i>Twitter</i> Sebagai Sarana Komunikasi Politik.....	36
2. <i>Instagram</i> : Strategi dan Media <i>Branding</i> Komunitas Gerakan Feminis.	38
D. Kesimpulan.....	40

BAB III: INTERNALISASI NILAI KESALEHAN PEREMPUAN PADA POLITIK PROTES GENDER DAN *PUBLIC SPHERE* YAMAN..... 42

A. Pendahuluan	42
B. Strategi Politik Kesalehan Perempuan Yaman dalam Perspektif Konsep Gender dan Subjek Feminisme Saba Mahmood.	43
1. <i>Pious Self-Cultivation</i> : Perempuan Yaman Menjadi Pribadi yang Lebih Tunduk dan Saleh.....	43
2. <i>Embodiment</i> : Fokus pada Tubuh sebagai Ranah Perwujudan dan Peraih Norma.....	45
C. Gender, Politik, dan Negara	48
D. Pelbagai Gerakan Perempuan Yaman dalam Dunia Siber Konsep Ruang Publik Jürgen Habermas.....	56
1. Lembaga <i>Women Journalist Without Chains</i> (WJWC).....	56

2. <i>Twitter</i> pelbagai Gerakan Perempuan Yaman.....	59
3. <i>Instagram</i> pelbagai Gerakan Perempuan Yaman	69
E. Kesimpulan.....	73

BAB IV: IMPLIKASI PERAN GERAKAN FEMINISME DI YAMAN DALAM NEGOSIASI KONFLIK DI PUSARAN KEKUASAAN..... 76

A. Pendahuluan	76
B. Otoritas Perempuan di Ruang Publik	77
1. Institusi Negara WNC (<i>Women National Committee</i>): Kekuatan Pendorong dibalik Pemberdayaan Perempuan	77
2. Janji Politik dengan Perempuan	80
C. Kapasitas Kepemimpinan Perempuan.....	82
1. Keterampilan Teknis dan Profesional (<i>Technical and Professional Skills</i>).....	83
2. Komunikasi, Jaringan, dan Manajemen (<i>Communication, Networking, and Management Skills</i>)	85
3. Kepemimpinan dan Keberanian (<i>Leadership and Bravery</i>).....	86
D. Pemberdayaan Perempuan dan Instabilitas	89
1. Rencana Nasional dan Perang Sipil	90
2. Pemimpin Perempuan: Garda Depan Agenda Pemberdayaan	92
3. Norma-norma Sosial (<i>Social Norms</i>): Perempuan Melepaskan Diri dari Pengekangan Tradisional	94
E. Budaya Dukungan Politik	96
1. Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Institusi Formal.....	97
2. Politik Gender dan Rezim Otoriter	105

3. Kebijakan Gender dan Retribusi Kekuasaan Sosial	110
4. Budaya Politik dan Gerakan Perempuan	116
F. Simpulan.....	121
BAB V: PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Data Pengguna Internet di Timur Tengah, 36.
- Gambar 2 Gerakan Protes Perempuan Yaman, 43.
- Gambar 3 Akun *Twitter* Presiden Manshour Hadi, 64.
- Gambar 4 Akun *Twitter* Women for Yemen Network, 64.
- Gambar 5 Akun *Twitter* UN Women Yemen – هيئة الأمم المتحدة للمرأة لليمن, 65.
- Gambar 6 Akun *Twitter* Tawakkol Karman, 65.
- Gambar 7 Akun *Twitter* Yemeni Women Pact – التوافق النسوي اليمني, 66.
- Gambar 8 kumpulan *hashtag* Feminisme Yaman dalam *twitter*, 66.
- Gambar 9 Forum The Feminist Peace Road Map 2022 dalam *twitter*, 67.
- Gambar 10 Forum Feminist Summit di Aden Yaman dalam *twitter*, 68.
- Gambar 11 Akun *instagram* “Yemeni Feminist Voice”, 70.
- Gambar 12 Isi *feed* pada akun *instagram* “Yemeni Feminist Voice”, 70.
- Gambar 13 Akun *instagram* “Yemeni Feminist Movement”, 71.
- Gambar 14 Isi *feed* pada akun *instagram* “Yemeni Feminist Movement”, 71.

DAFTAR SINGKATAN

APWLD	: <i>Asia Pacific Forum on Women, Law and Development</i>
AQAP	: <i>Al Qaeda in Arabian Peninsula</i>
BMZ	: <i>Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
GIZ	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
ICERD	: <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
ICRC	: <i>International Committee Of The Red Cross</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
NDC	: <i>National Dialog Conference</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
PDRY	: <i>People's Democratic Republic of Yemen</i>
RAY	: <i>Republik Arab Yaman</i>
RDY	: <i>Republik Demokratik Yaman</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
WILPF	: <i>Women's International League for Peace and Freedom</i>
YRCS	: <i>Yemen Red Crescent Society</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi politik di Timur Tengah identik dengan adanya konflik.¹ Konflik dapat berupa permasalahan transnasional dalam pelbagai macam aspek, baik itu dari segi keamanan, ekonomi, politik maupun ideologi.² Salah satu konflik politik di Timur Tengah adalah konflik Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman saat ini merupakan puncak dari gelombang yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Diawali dari gelombang *Arab Spring* yang terjadi pada akhir tahun 2010 yang

¹ Firmanda Taufiq dan Rahmat Linur, "Realisme dan Konflik Timur Tengah dalam Kesusastraan Arab", *Nady al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, Vol. 18 No. 2 (2021). Lihat juga Muhammad Zainal Muttaqien, "Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah", *Nation State Journal of International Studies*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018). Nilna Indriana, "Pemetaan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)", *An-Nas: Jurnal Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2017). Ismah Tita Ruslin, "Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor 1 (Tahun 2013): 2-5.

² Rizki Pratama Putra, Maryam Jamilah, Poppy Irawan, "Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah," *Jurnal PIR* Vol. 4 No. 1 (2019), 2528-7192. Selain itu, Yaman merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang mengalami *proxy war*. Lihat Fahrudin dan Habib Akbar, "*Proxy War* dalam Konflik Yaman," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Volume 18, No. 1, (Maret 2012): 2. Menurut Poltak Partogi Nainggolan, 2020, konflik internal yang berlangsung di Yaman tidak hanya dapat memenuhi kepentingan pihak internal yang bertikai, namun juga pihak luar yang turut berkepentingan dengan kompleksitas kepentingannya masing-masing.

menyeret Yaman ke dalam pusaran konflik.³ Konflik Yaman bertransformasi menjadi perang saudara yang semakin besar dan memakan banyak korban.⁴

Yaman merupakan negara konservatif yang miskin di antara negara-negara Timur Tengah dan gempur akan konflik, baik konflik etnis ataupun agama.⁵ Sekte yang kuat adalah Islam Syiah Zaidiyah (Houthi)⁶ yang menentang dan mengudeta pemerintahan Ali Abdullah Saleh. Ialah Tawakul Karman salah satu tokoh perempuan pegiat Hak Asasi Manusia Yaman, wartawan, dan juga pejuang hak-hak perempuan, di balik revolusi yang menggulingkan Ali.⁷ Karman adalah pengagas *Women Journalist Without Chains* yang memimpin ribuan perempuan bersama demonstran lain memprotes masalah pengangguran, krisis ekonomi, korupsi dan pelbagai usulan perubahan konstitusi. Selain itu, kaum perempuan

³ Fenomena *Arab Spring* yaitu sebuah fenomena gelombang protes besar-besaran, pemberontakan militer terhadap pemerintahan yang melanda di negara-negara Timur Tengah. *Arab Spring* juga melanda Yaman yang dimulai pada 16 Januari 2011 dengan demonstrasi kecil di kota Sana'a. Menurut Jamshidi, 2014, setelah jatuhnya presiden Mesir Hosni Mubarak, para pengunjung rasa mulai turun di kota Sana'a dengan jumlah massa yang lebih besar dan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan presiden Ali Abdullah Saleh yang dianggap otoriter karena menjabat dan menguasai Yaman selama 33 tahun.

⁴ Alvis Rahman Bhasuki, dkk, "Perang Saudara di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif dan Prospek Resolusi Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume IX Nomor 1, (Juni 2019): 2-6. Tim Peneliti dari Pusat Studi ASEAN, Asia Afrika dan Timur Tengah, Universitas Padjadjaran. Tim peneliti terdiri dari empat orang, antara lain; Alvis Rahman Bhasuki, John Daniel Chrisvaldo Siahaan, Windy Dermawan dan Akim.

⁵ Putra, dkk, "Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman untuk Membendung Pengaruh Iran di Timur Tengah", 8.

⁶ Salah satu kelompok yang kuat dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yaman adalah kelompok *al-Houthi*. Kelompok ini pada awalnya hanya berada di Yaman Utara, tepatnya di kota Sa'adah, sebuah kota yang terletak 240 km di utara ibu kota Sana'a. Di sana terdapat perkumpulan terbesar orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman. Pada tahun 1985, dibentuk sebuah perkumpulan untuk mempelajari ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah. Perkumpulan itu disebut dengan *Itihad asy-Syabab* (Persatuan Pemuda). Kelompok ini didirikan oleh Husein bin Badruddin al-Houthi. Selengkapnya lihat Ahmad Fuadi, "Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, (2017) dalam jdod.ejournal.unri.ac.id, diakses tanggal 21 November 2022, 20.08.

⁷ Nahed Eltantawy, "From Veiling to Blogging: Women and Media in the Middle Eastern", *Jurnal Feminist Media Studies*, Volume 13 Nomor 5, (2013): 1-2, dalam <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2013.838356>, diakses tanggal 22 Desember 2022, 13.08.

terbelenggu oleh tradisi dan diperlakukan sebagai warga kelas dua.⁸ Kasus kawin paksa gadis di bawah umur menjadi *headline* surat kabar di Yaman. Tawakkul Karman memperjuangkan nasib perempuan sejak lama agak sedikitnya 30 persen posisi di kantor pemerintahan diisi oleh perempuan.⁹ Oleh sebab itu, perjuangan Karman memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian dan mendedikasikan hadiah tersebut untuk seluruh gerakan pembebasan di negara Arab.

Oxfam International¹⁰ mengatakan empat dari lima perempuan Yaman mengklaim hidup mereka memburuk selama tahun 2011. Berhadapan dengan krisis kemanusiaan meningkat, kaum perempuan mengatakan bahwa mereka kesulitan memberi makan keluarga dan tidak dapat berpartisipasi dalam periode transisi di negara mereka.¹¹ Akibatnya, krisis makanan menjadi kendala besar di Yaman.¹² Dalam keadaan konflik, perempuan seharusnya diperlakukan sebagai objek yang harus dilindungi. Namun pada kenyataannya, ketika konflik terjadi perempuan sering kali menjadi pihak yang paling disakiti. Dimana mereka sering kali mendapatkan tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan ketika konflik terjadi. Pada tahun 1949, perwakilan diplomatik menyetujui dan menandatangani

⁸ Rumah Kitab, "Tantangan Perempuan Yaman," dalam <https://rumahkitab.com/tantangan-perempuan-yaman/>, diakses tanggal 22 Desember 2022, 13.17.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Oxfam International adalah konfederasi internasional terdiri dari dua puluh organisasi yang bekerjasama di lebih dari sembilan puluh negara sebagai bagian dari sebuah gerakan global untuk perubahan, membangun masa depan yang bebas dari ketidakadilan akibat kemiskinan. Lebih lanjut lihat <https://indonesia.oxfam.org/siapa-kami>. Selain itu, Oxfam International beriktikad menghapus kemiskinan. Organisasi ini menjalankan program pembangunan edukasi publik, kampanye advokasi dan bantuan kemanusiaan. Organisasi ini berfokus pada ketimpangan ekstrem dan layanan penting, seperti; pangan, iklim dan sumber daya alam, keadilan gender dan hak-hak perempuan, konflik dan bencana, serta air dan sanitasi. Lebih lanjut lihat <https://asiasociety.org/id/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-toolkit/stakeholders/organisasi-masyarakat-sipil-csolembaga-swadaya-masyarakat-ngo/internasional/oxfam-international>, diakses 28 Desember 2022, 10.12.

¹¹ Rumah Kitab, "Tantangan Perempuan Yaman".

¹² Laporan dari Sultan Bagum, penasihat kebijakan kemanusiaan Oxfam.

perubahan pada Konvensi I, II dan III serta terbentuknya Konvensi Jenewa IV.¹³ Konvensi Jenewa IV bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil pada saat konflik. Pada pasal 27 paragraf kedua menyebutkan “wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan”.¹⁴

Dengan pelbagai konflik yang terjadi di Yaman, muncul protes politik dari kalangan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan menuntut kesetaraan gender di ruang publik.¹⁵ Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena melihat bahwa adanya kesadaran feminisme yang tumbuh di Yaman. Seperti yang diketahui, situasi konflik yang terjadi memicu pelanggaran hak asasi manusia khususnya diskriminasi perempuan. Seperti yang dikutip dari laporan PBB, hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman antara tahun 2014 dan 2019 melakukan pelbagai bentuk kekerasan seksual. Para pelaku adalah anggota pasukan keamanan, kelompok pemberontak dan bersenjata, pasukan pemerintah dan warga sipil.¹⁶

¹³ Agustianty Debora Sihite. Upaya International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa Iv Bagi Perempuan Di Konflik Yaman, *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 6 (3) 1153-1168, (2018).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kesetaraan dan keadilan gender merupakan situasi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai dan mendukung di pelbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan setara dan adil, dapat dilihat sejauh mana akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan bangsa. Lihat Nur Azizah dan Khomisah, “Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender, *Az-Zahra Journal Of Gender and Family Studies*, (2021).

¹⁶ Rumah Kitab, “Tantangan Perempuan Yaman”.

Pada masa pemerintahan Manshour Hadi, dibentuk kebijakan tentang pemberdayaan perempuan. Namun, terdapat banyak kendala ketika mengupayakan kebijakan pemberdayaan perempuan di dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah Yaman berupaya melakukan pemberdayaan perempuan melalui dua jalur paralel: *pertama*, keterlibatan perempuan dalam lingkaran pengambilan keputusan dengan menunjuk mereka di posisi pemerintahan. *Kedua*, implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pelbagai bidang terutama dalam kesehatan, pendidikan dan ekonomi.¹⁷ Namun pada faktanya, terdapat kegagalan dalam pemberdayaan perempuan tersebut. Kegagalan kebijakan pemberdayaan perempuan tersebut dijelaskan karena kurangnya kapasitas di antara para pemimpin perempuan yang merancang dan mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan.¹⁸

Kurangnya dukungan politik perempuan¹⁹ antara lain pada norma budaya dan sikap pada perempuan yang berkontribusi terhadap kekurangan program pelatihan yang berorientasi pada kepemimpinan dan pendidikan politik.²⁰ Hambatan eksternal bagi perempuan ialah hambatan dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam

¹⁷ Nadia Al-Sakkaf, *Of ambition, opportunity, and pretence The Politics of Gender in Yemen*, Submitted in partial fulfilment of the degree Doctor of Philosophy, School of Politics, International Relations and Economics.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Marie Antoinette Sossou menerima gelar PhD dari University of Denver di Colorado dan MSW dari University of Trondheim di Norwegia. Ia saat ini menjadi asisten profesor Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial, Universitas Kentucky. Fokus Penelitian dan minatnya adalah seputar pekerjaan sosial internasional dengan minat khusus di Afrika dan negara berkembang lainnya, terkait isu feminis dan gender, anak-anak, imigran dan pengungsi, serta isu pembangunan sosial. Lebih lanjut lihat <https://gws.as.uky.edu/users/msossou> , diakses tanggal 22 Desember 2022, 11.43.

²⁰ Sossou Marie Antoinette. "We Don't Enjoy Equal Politics Rights: Ghanaian Women's Perceptions on Political Participation in Ghana," *Sage Open*. Vol I (9) (2011).

politik.²¹ Akibat kurangnya dukungan politik perempuan dalam pemerintahan Yaman, muncul protes politik gender di ruang publik. Protes politik (*the politics of protest*)²² merupakan poin penting tentang hubungan antara protes dan kekerasan yang tidak bisa fokus hanya pada karakter atau budaya dari mereka yang memprotes keadaan dari tatanan politik dan sosial di suatu negara.²³ Protes dalam rezim Manshour Hadi dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam strategi yang lebih luas dalam politik elit. Sifat protes politik dikondisikan oleh tiga variabel²⁴ antara lain; Ekologi organisasi (lingkungan umum dimana organisasi ada dan jenis organisasi); strategi mobilisasi negara (apakah elit politik memobilisasi pengunjuk rasa); dan tingkat kompetensi politik.²⁵ Adapun Ruang Publik (*Public Sphere*)²⁶ dapat digunakan untuk berkumpul, berdiskusi dan berekspresi secara bebas dalam melayani kepentingan umum, termasuk untuk ekonomi bisnis, birokrasi, politik dan sebagainya. Negara sebagai pemilik otoritas kebijakan dan pelaksana ruang publik politik, memiliki tugas untuk kesejahteraan

²¹ Nurwani, *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).

²² Jerome H. Skolnick bergabung dengan fakultas di Berkeley pada tahun 1962 dan menjadi bagian dari fakultas Hukum Berkeley pada tahun 1977. Dari tahun 1972-1984 ia memimpin Pusat Studi Hukum dan Masyarakat. Ia juga mengajar di UC San Diego, Universitas Chicago dan Universitas Yale, serta telah menjadi tamu peneliti di Oxford. Lebih lanjut lihat <https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/jerome-skolnick/> , diakses tanggal 28 Desember 2022, 14.22.

²³ Jerome H. Skolnick, "The Politics of Protest: Violent Aspects of Protest Confrontation," Volume 3 *NCCPV staff study series*, United States National Commission on the Causes and Prevention of Violence.

²⁴ Graeme B. Robertson merupakan seorang professor ilmu politik di University North California di Chapel Hill dan Direktur Pusat Studi Slavia, Eurasia, dan Eropa Timur. Karyanya berfokus pada protes politik dan dukungan rezim di rezim otoriter. Lebih lanjut lihat <https://politicalscience.unc.edu/staff/graeme-robertson/> dan <https://www.journalofdemocracy.org/authors/graeme-b-robertson/> , diakses tanggal 28 Desember 2022, 14.27.

²⁵ Graeme B. Robertson, *The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in Post-Communist Russia*, New York: Cambridge University Press. 2012.

²⁶ Jürgen Habermas, *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset, 2012), 47.

rakyat melalui sistem demokrasi.²⁷ Sedangkan politik kesalehan (*politic of piety*) merupakan analisis inovatif politik budaya kaum radikal Islam melalui etnografi gerakan kesalehan perempuan yang berkembang di masjid-masjid Kairo, Mesir.²⁸ Saba Mahmood menyatakan bahwa terdapat tiga bahasan pertanyaan utama, antara lain; gerakan reformasi moral membantu kita memikirkan kembali kisah normatif liberal tentang politik; kepatuhan perempuan terhadap norma-norma patriarkal pada inti gerakan tersebut menciptakan asumsi dalam teori feminis tentang kebebasan, hak pilihan, wewenang, dan subjek manusia; serta sebuah pertimbangan debat tentang agama terwujudkan. Politik kesalehan merupakan isu-isu dalam hubungan etika dan politik, perwujudan dan gender, serta liberalisme dan poskolonialisme.²⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji protes politik perempuan di ruang publik Yaman, serta membangun wacana terkait pembelaan diri yang dilakukan para perempuan sebagai bentuk perlawanan atas dasar ketidakadilan yang dirasakan. Penulis menganalisis dengan menggunakan teori politik kesalehan (*politic of piety*) oleh Saba Mahmood. Selain itu penulis juga menggunakan pisau analisis feminisme marxis sosialis Juliet Mitchell dan

²⁷ Wahid Nashihuddin, "Public Sphere Menurut Jürgen Habermas", (23 September 2019) dalam <https://pustakapUSDokinfo.wordpress.com/2019/09/23/public-sphere-menurut-Jürgen-habermas/>, diakses 22 Desember 2022, 14.00. Lihat juga Melati Mediana Tobing, "Pemikiran Tokoh Filsafat Komunikasi," Diktat Ilmu Komunikasi UKI Jakarta, Agustus 2017 dalam http://repository.uki.ac.id/1104/1/2016_UKI_Habermas_Ruang%20Publik.pdf.

²⁸ Saba Mahmood merupakan seorang profesor antropologi di University of California, Berkeley. Di Berkeley, ia juga berafiliasi dengan Pusat Studi Timur Tengah, Institut Studi Asia Selatan. Bukunya yang berjudul *Politics of Piety: the Islamic Revival and the feminist subject* adalah salah satu karya akademik penting dan berpengaruh dalam abad ke-21. Banyak bidang keilmuan dan aliran pemikiran sosial yang turut terguncang akibat kritik dan argumen yang dilancarkan Mahmood dalam buku tersebut, termasuk studi gender, studi sekularisme, antropologi studi Islam, studi pasca-kolonial, serta gerakan feminis sendiri.

²⁹ Saba Mahmood, *Politics of Piety: the Islamic Revival and the feminist subject*, (UK: Princeton University Press. 2005).

konsep *public sphere* Jürgen Habermas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran perempuan Yaman muncul mengenai hak-hak perempuan yang terjadi di tengah rezim presiden Manshour Hadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perempuan mengekspresikan bentuk protes politik gender di ruang publik Yaman pada era pemerintahan Presiden Manshour Hadi
2. Mengapa perempuan hadir di ruang publik ketika konflik Yaman?
3. Bagaimana pengaruh gerakan feminisme yang menyuarakan hak-hak perempuan pada negosiasi konflik Yaman dalam politik gender negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji terkait munculnya kesadaran perempuan tentang tingginya patriarkisme dan adanya perlawanan serta protes dari perempuan mengenai sistem politik pemerintahan di Yaman.
2. Untuk meneliti kiprah gerakan perempuan di tengah kondisi negara Yaman yang penuh konflik.

3. Untuk menggali munculnya gerakan perempuan Yaman dalam menyuarkan aspirasi mereka di ruang publik, kondisi dan kedudukan perempuan pada ranah sosial politik di Yaman.

D. Kajian Pustaka

Studi mengenai politik protes gender dan keterlibatan perempuan di negara-negara Arab dalam pusran politik negara masih terus menjadi kajian yang menarik dan mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi para aktivis feminis. Studi-studi tersebut telah penulis kategorikan ke dalam dua kecenderungan, diantaranya; *Pertama*, tuntutan kesetaraan gender dalam bidang politik; *Kedua*, kemajuan dan keberanian perempuan di negara Islam konservatif untuk berdemonstrasi mengambil langkah besar untuk mendobrak batasan tabu. Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa pustaka yang ditemukan dan memiliki beberapa fokus aspek yang akan dikaji mengenai perempuan dan konflik di Yaman. Berkaitan dengan gender di Yaman antara lain;

1. Diskriminasi Perempuan dan *Gender Inequality*

Pertama, Upaya *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*

Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagi Perempuan Di Konflik Yaman, Artikel yang ditulis oleh Agustianty Debora Sihite pada 2018 membahas tentang penegakan pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi perlindungan perempuan di konflik Yaman dengan memberikan bantuan medis yang mana ICRC bekerjasama dengan YRCS untuk menyalurkan obat-

obat, alat kesehatan maupun tenaga medis. ICRC juga memberikan layanan rumah aman (*Safe Houses*) bekerjasama dengan YRCS dan UNFPA. Dalam hal ini Agustiani Debora menggunakan pisau analisis Hukum Humaniter Internasional.³⁰

Kedua, penelitian yang lebih terfokus pada konflik gender di Yaman dalam artikel yang berjudul “*Conflict and Gender Dynamics in Yemen*” karya Brigitte Rohwerder, Institute of Development Studies mengeksplorasi dampak konflik atas dinamika gender di Yaman. Pelbagai penilaian yang dilakukan terhadap situasi di Yaman sejak Maret 2015 adalah '*gender blind*'. Sejumlah penelitian dan survei telah dilakukan oleh pelbagai organisasi PBB dan organisasi non-pemerintah (LSM yang bekerja pada respon yang berlaku di Yaman, yang lebih memfokuskan pada gender atau secara khusus pada perempuan. Laporan yang dihasilkan oleh organisasi yang bekerja di Yaman, seperti Oxfam, Saferworld, dan CARE, memberikan rekomendasi dan perspektif dari prioritas, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak konflik. Yaman berada di urutan terakhir dari 144 negara yang termasuk dalam indeks kesenjangan Gender Global Forum ekonomi dunia 2016, sebuah posisi yang sudah berdiri selama 10 tahun terakhir. Pada pemberontakan tahun 2011, perempuan aktif berpartisipasi dalam aksi protes,

³⁰ Agustianty Debora Sihite. Upaya International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa Iv Bagi Perempuan Di Konflik Yaman

sementara perempuan mewakili sebagai partisipan dalam Konferensi Dialog Nasional (NDC) pada 2014.³¹

Ketiga, Artikel yang berjudul *From The Ground Up: Gender and Conflict Analysis in Yemen* karya Wolfgang Gressmann yang memaparkan tentang konflik dan krisis kemanusiaan mempengaruhi pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki secara berbeda karena peran sosial mereka yang berbeda dan ketimpangan sosial serta ekonomi yang sudah berurat akar menjadi semakin buruk selama krisis. Para wanita memikul beban dalam menjalankan rumah tangga di bawah tekanan ekstrem dan sering kali terpapar pada pelbagai bentuk kekerasan berbasis gender selama keadaan darurat. Wanita dan anak perempuan menjadi lebih rentan karena pelayanan dasar merosot dan mata pencaharian berkurang.³²

2. Politik Gender

Tesis yang ditulis oleh Nadia Al-Sakkaf pada 2019 menjelaskan tentang Yaman yang terus-menerus menjadi salah satu tempat terburuk di dunia dalam hal hak perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menurut indikator pembangunan internasional.³³ Penelitian ini menyelidiki umpan balik dari wanita Yaman terkemuka, yang merupakan pengemudi utama di balik kesetaraan gender di Yaman, dan yang secara

³¹ Brigitte Rohwerder, "Conflict and Gender Dynamics in Yemen", Institute of Development Studies K4D (Knowledge, evidence and learning for development, *UK Department for International Development and other Government departments*, (2017): 3-4.

³² Wolfgang Gressmann. "From The Ground Up: Gender and Conflict Analysis in Yemen". *Published by Oxfam GB for Oxfam* pada (Oktober 2016). Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

³³ Nadia Al-Sakkaf, *Of Ambition, Oportunity and Pretence The Politics of Gender in Yemen*, School of Politics, (International Relations and Economics, 2019).

langsung terlibat dalam upaya pemberdayaan wanita dalam kerangka waktu yang diteliti.

3. Hak-hak Perempuan

Artikel yang berjudul *Legal Reform As A Way To Women's Right: The Case Of Personal Status Law In Yemen* yang ditulis oleh Douaa Hussein, membahas reformasi hukum Status pribadi tidak cukup untuk memastikan kesetaraan gender dalam konteks Yaman di mana sistem hak agama dan budaya tetap tidak tersentuh, penafsiran syariah dan konservatif membentuk konseptualisasi utama hak-hak dalam hukum saat ini. Penulis mengklaim bahwa hukum yang berlaku yang terutama didasarkan atas syariah, mengukuhkan konsep "hak yang salah menghalangi upaya wanita untuk memastikan kesetaraan dalam hukum Status pribadi."³⁴ Ada tiga poros untuk konseptualisasi hak yang mempengaruhi perumusan hukum status pribadi yaitu, perwalian (syariah), persaudarian (konstitusi), serta yang lemah dan tergantung (adat adat suku). Mereka bertiga mencerminkan penafsiran yang sempit atas kebijakan syariah dan patriarkat yang diajukan oleh negara dan masyarakat. Realisasi keadilan gender di bidang hukum Status pribadi dan penerapan efektif hukum membutuhkan pendekatan multi-dimensi misalnya interpretasi yang tercerahkan tentang syariah, mengadopsi prinsip timbal balik dan pendekatan berbasis konsekuensi.³⁵

³⁴ Douaa Hussein, "Legal Reform As A way To Women's Right: The Case Of Personal Status Law In Yemen", *OIDA International Journal of Sustainable Development* 02:12 (2011)

³⁵ Shalihah dan Sidik, "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan."

4. Ruang Publik Yaman

Artikel yang berjudul *Susanne Dahlgren, Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen* karya Eirik Hovden.³⁶ Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan sejarah dari kota pelabuhan Aden yang beragam etnis, kompleks, dan kosmopolitan. Penulis menjelaskan tiga periode berbeda dalam sejarah Aden dan pengaruhnya terhadap gender dan masalah terkait keluarga. Selama pemerintahan sosialis, hukum keluarga Islam masih diterapkan dan dipraktekkan. Modernisasi sosialis menggunakan wacana baru yang berbeda dengan penekanan pada *tahrīr al-mar'a* (emansipasi wanita) yang unik di Arab. Hovden menggambarkan biografi perwakilan tertentu kehidupan informan, beserta gagasan, peran, dan agensi mereka dalam isu-isu terkait gender.

Setelah menelusuri beberapa literatur terkait, penulis melihat bahwa telah ada penelitian yang membahas mengenai ketidakadilan dan diskriminasi gender serta perubahan perilaku dan perkembangan feminis yang didasari oleh tekanan konflik di Yaman. Namun, penelitian mengenai protes politik gender di ruang publik Yaman dalam internalisasi nilai kesalehan perempuan sekaligus perubahan perilaku para aktivis feminis yang merasa tertindas di negaranya akibat sistem hukum dan Undang-Undang secara khusus belum pernah dilakukan dan perlu untuk dikaji sebagai sumbangsih khazanah keilmuan baru dalam bidang politik gender, budaya dukungan politik dan sosial. Penulis berharap, penelitian ini dapat mengisi kekosongan (*gap*)

³⁶ Eirik Hovden, *Susanne Dahlgren, Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen*, (New York: Syracuse University Press, 2010) .

terkait literatur permasalahan diskriminasi gender dalam bidang politik yang ada di negara Yaman.

E. Kerangka Teoretis

1. *Public Sphere* Jürgen Habermas

Ruang publik dapat terjadi secara luring atau secara daring, dan dapat meliputi forum-forum seperti media massa, media sosial, atau forum-forum diskusi online. Makna “Ruang Publik” dipengaruhi oleh konteks dan ilmu yang sedang mengartikulasikannya. Misal dalam konteks dunia digital internet, ruang publik adalah *cyberspace* tempat interaksi maya terjadi. Bagi pengkaji aktivis media, ruang publik adalah perusahaan penyiaran yang disponsori oleh pemerintah. Adapun dalam kesadaran feminis, ruang publik adalah arena sosial tempat aneka hukum, kontrak dan persetujuan yang mengeksklusi wanita dibuat.³⁷

Jürgen Habermas adalah seorang filsuf Jerman yang memperkenalkan konsep "ruang publik" atau "public sphere" dalam teorinya tentang demokrasi dan komunikasi. Ruang publik borjuis dapat dimengerti sebagai ruang masyarakat privat (*sphere of privat people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Mereka mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi guna melawan otoritas publik.³⁸ Ruang publik membentuk secara eksplisit fungsi-

³⁷ Antonius Galih Prasetyo, “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 2, (November 2012): 169-185.

³⁸ Jürgen Habermas, “*Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*”, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2007), 41.

fungsi politis di dalam medan hubungan antara negara dan masyarakat yang penuh ketegangan. Subjektivitas yang berakar di dalam ruang intim keluarga konjugal³⁹ telah menciptakan publiknya sendiri. Pengendalian terhadap ruang publik oleh otoritas publik dimenangkan oleh penalaran kritis manusia-manusia privat mengenai isu-isu politis. Sebuah ruang publik dalam bentuknya yang apolitis sudah berkembang di bawahnya lewat perintisan kesusastraan (*the literary precursor*) mengenai pengoperasian ruang publik di wilayah politis.⁴⁰ Hubungan antara negara dan masyarakat membuat ruang publik terpisah dari wilayah privat. Ruang publik hadir seluas otoritas publik. Yang terkandung di wilayah privat adalah ‘ruang publik’ yang autentik, sebuah ruang yang dibentuk oleh masyarakat privat sendiri. Ruang privat mencakup masyarakat sipil dalam pengertian lebih sempit yakni wilayah pertukaran komoditas dan wilayah kerja sosial –dengan berlandaskan ruang dalam keluarga konjugal. Sementara itu, ruang publik di wilayah politis berkembang dari ruang publik di dunia sastra. Dengan mengendarai opini publik, dia mempersentuhkan negara dengan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat sipil.⁴¹

Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan suatu tempat di mana terjadi komunikasi yang jujur, rasional, dan terbuka antara warga negara yang merdeka dan sejahtera. Ruang publik dalam tulisan-tulisan Habermas merupakan ruang yang ditelaah dari perspektif politik. *Public Sphere* memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang

³⁹ Istilah *conjugal* diterjemahkan sebagai ‘konjugal’ yang artinya adalah cinta suami istri dalam perkawinan.

⁴⁰ Habermas, “*Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori*”, 44-45.

⁴¹ *Ibid*, 46.

yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik.⁴² Ruang publik juga merupakan tempat di mana warga negara dapat menyatakan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Namun, Habermas juga menyadari bahwa ruang publik tidak selalu merupakan tempat yang ideal, dan ada beberapa faktor yang dapat menghambat terciptanya komunikasi yang jujur dan rasional di dalamnya. Misalnya, adanya kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, atau adanya pengaruh dari media massa atau kekuasaan politik dapat menghambat terciptanya ruang publik yang sehat.

2. Konsep Kesalehan Perempuan Saba Mahmood

Penelitian ini menggunakan konsep politik kesalehan perempuan (*The Politics of Piety*) Saba Mahmood⁴³ yang melihat dari aktor gerakan perempuan Mesir dalam etnografi dan aktivitas masjid. Saba Mahmood memberikan kontribusi teoritis untuk memikirkan kembali relasi antara etika dan politik, agama dan sekularisme, serta kebebasan dan ketundukan. Dengan melintasi batas-batas disiplin ilmu humaniora dan ilmu sosial, karya Mahmood ini telah membentuk penyelidikan teoritis dan etnografis tentang agama dan kebebasan, serta warisan kolonialisme, kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme dalam konflik kontemporer di Timur Tengah. Teori ini menganalisa secara antropologis yang melibatkan praktik dan fenomena budaya. Dengan cara ini,

⁴² *Ibid*, 4-5.

⁴³ Mahmood, *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject.*, 87.

Mahmood menginterogasi hubungan antara praktik tubuh di satu sisi, dan terkait dengan imajinasi etis dan politis di sisi lain. Sementara itu, pada saat yang sama, Mahmood mempertanyakan pemisahan domain etika dan politik.

Hubungan antara feminisme dan agama merupakan perdebatan paling nyata dalam diskusi Islam. Hal ini disebabkan oleh persoalan-persoalan kontroversial yang terjadi pada masyarakat Islam dengan apa yang kemudian disebut "Barat", tetapi juga terkait dengan tantangan-tantangan yang dilancarkan gerakan kaum Islamis kontemporer hingga menjadi politik liberal yang menjadi bagian integral. Kecurigaan yang dilancarkan oleh banyak feminis cenderung untuk melihat gerakan kaum Islamis meningkat setelah serangan 11 September 2001 yang dilancarkan terhadap Amerika Serikat dan gelombang besar sentimen anti-Islam yang menyusul sejak saat itu. Mahmood menjelajahi sejumlah tantangan konseptual yang melibatkan perempuan dalam gerakan Islamis itu secara khusus mengarah pada teori feminis, dan pemikiran liberal sekularis secara umum.

Tujuan Mahmood membuat materi asumsi liberal norma-norma tentang sifat manusia — seperti kepercayaan bahwa semua manusia memiliki hasrat bawaan untuk kebebasan, hak pilihan manusia terutama terdiri dari tindakan-tindakan yang menantang norma-norma sosial. Tidak seperti beberapa tradisi keagamaan lainnya (seperti puritanisme) dimana "*piety*" terutama merujuk pada negara-negara di dalam agama, penggunaan istilah arab *taqwa* (yang dapat diterjemahkan sebagai "kesalehan") menunjukkan adanya orientasi ke dalam atau kecenderungan dan sikap praktis. Dukungan

aktif perempuan untuk gerakan sosial dan agama yang mempertahankan prinsip perempuan yang tunduk menimbulkan dilema bagi para analis feminis. Di satu sisi, para perempuan terlihat menunjukkan kehadiran mereka dalam lingkup yang sebelumnya didefinisikan khusus pria sementara, di sisi lain, idiom-idiom yang mereka gunakan untuk memasuki arena-arena ini didasarkan pada pengetahuan yang secara historis menjamin bahwa mereka tunduk pada wewenang pria. Dengan kata lain, ketundukan wanita terhadap sifat-sifat yang feminin, seperti sifat pemalu (*haya'*), kesahajaan, dan kerendahan hati, merupakan kondisi yang diperlukan bagi meningkatnya peranan mereka dalam kehidupan religius dan politik. Memanfaatkan kerja dalam bidang kemanusiaan dan ilmu sosial yang telah berfokus pada pengoperasian lembaga manusia dalam struktur-struktur pendukung perempuan yang tunduk telah berusaha untuk memahami bagaimana wanita melawan perintah laki-laki yang dominan dengan merusak makna hegemoni praktik budaya dan mengarahkan mereka untuk "kepentingan dan agenda mereka sendiri". Pentingnya pengetahuan feminis tentang agensi perempuan terus ditekankan, terutama ketika mengingat bahwa media populer Barat terus menggambarkan kaum perempuan Muslim secara tak sebanding terikat oleh rantai tak terpecah-belah penindasan agama dan patriarkat. ⁴⁴

Menurut teori ini, kesalahan perempuan tidak boleh diukur dengan standar yang sama dengan kesalahan laki-laki. Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi agama, kesalahan perempuan dianggap terkait dengan

⁴⁴ Mahmood, *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject.*, 42-65.

kepatuhan terhadap peran gender yang ditetapkan oleh agama atau masyarakat. Namun, menurut Mahmood, kesalahan perempuan harus diukur berdasarkan bagaimana perempuan itu sendiri memahami dan menjalankan perannya dalam masyarakat, bukan berdasarkan bagaimana perannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Perempuan harus memiliki kebebasan untuk memahami dan menjalankan perannya sendiri, bukan hanya sebagai pasangan atau pelengkap laki-laki. Teori ini juga menekankan pentingnya hak asasi perempuan untuk memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan gender.

3. Politik Protes Gender dan *Women's Oppression* Juliet Mitchel

Politik protes gender merupakan tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memperjuangkan hak-hak gender dan mengkampanyekan pemahaman yang lebih sejahtera tentang gender. Gerakan feminisme adalah salah satu bentuk dari politik protes gender yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Politik protes gender adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menentang diskriminasi jenis kelamin dan mendemokratisasikan hak-hak perempuan. Gerakan ini berusaha untuk mengubah struktur masyarakat yang patriarkis dan mencapai kesetaraan gender. Protes gender juga termasuk gerakan yang

memperjuangkan hak-hak LGBTQ+⁴⁵ dan menentang diskriminasi terhadap identitas gender dan orientasi seksual.

Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kurangnya hak perempuan dalam masyarakat, termasuk kesenjangan gaji, kekerasan terhadap perempuan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Gerakan protes gender juga mencakup upaya untuk menghapus stigma dan *stereotype* terhadap perempuan dan identitas gender lainnya, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Gerakan protes gender merupakan bagian dari gerakan hak asasi manusia secara keseluruhan dan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, masih ada banyak upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang hakiki dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan identitas gender lainnya.

Juliet Mitchell seorang psikolog dan penulis Inggris yang terkenal karena karyanya tentang feminisme dan teori gender. Dalam bukunya yang terkenal, "Women's Estate", Mitchell mengembangkan teori tentang posisi perempuan dalam masyarakat patriarki. Menurut Mitchell, perempuan dianggap sebagai subyek yang dipaksa untuk memenuhi harapan sosial yang ditetapkan bagi mereka, sementara pria dianggap sebagai subyek yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Mitchell menyatakan bahwa ini merupakan bentuk dominasi patriarki yang

⁴⁵ Emily M.Lund, Claire Burgess dan Andy J. Johnson (eds.), *Violence Against LGBTQ+ Person Research, Practice, and Advocacy*, (Switzerland: Springer Nature, 2021).

menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dan mengeksploitasi mereka.

Mitchell menggabungkan gambaran materialis dan ekonomi dari kapitalisme dengan gambaran yang kebanyakan nonmaterialis, atau ideologi mengenai patriarki. Ia mengatakan bahwa suatu revolusi Marxis yang bertujuan untuk menghancurkan masyarakat kelas harus dikombinasikan dengan revolusi yang secara khusus feminis yang ditujukan untuk menghancurkan sistem seks/gender.⁴⁶

Mitchell berpendapat bahwa ideologi patriarkal, yang memandang perempuan sebagai kekasih, istri, ibu, lebih daripada sebagai pekerja, bertanggung jawab paling tidak atas posisi perempuan di dalam masyarakat. Walaupun revolusi Marxis berhasil menghancurkan keluarga sebagai unit ekonomi, revolusi itu tidak akan membuat perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Hal itu terjadi disebabkan oleh cara patriarki mengkonstruksi psike laki-laki dan perempuan. Perempuan akan terus menjadi subordinat laki-laki hingga pemikiran perempuan dan pemikiran laki-laki terbebaskan dari pemikiran bahwa perempuan kurang setara dengan laki-laki.

Opresi terhadap perempuan terkubur jauh di dalam psike manusia, menyebabkan Mitchell menolak klaim feminis liberal bahwa reformasi sosial bertujuan untuk memberikan perempuan lebih banyak kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang akan membuat perempuan setara dengan laki-laki. Gerakan hak pilih bagi perempuan, kajian koedukasional, dan

⁴⁶ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Komprehensif Aliran Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), 175-178.

kebijakan tindakan afirmatif mungkin dapat mengubah ‘ungkapan femininitas’, tetapi menurut Mitchell, semua itu tidak dapat secara signifikan mengubah status perempuan secara umum. Mitchell juga menolak klaim feminis radikal bahwa teknologi reproduksi adalah kunci bagi pembebasan perempuan karena, menurut pandangannya, pemecah biologis semata tidak dapat memecahkan masalah yang pada dasarnya bersifat psikologis. Mitchell menolak klaim feminis Marxis tradisional bahwa suatu revolusi ekonomi yang ditujukan untuk menghapuskan tatanan kapitalis akan membuat laki-laki dan perempuan partner sepenuhnya di dalam tindakan, dan teman di dalam kebaikan. Menurut Mitchell, sikap terhadap perempuan tidak akan benar-benar berubah selama psikologi perempuan dan laki-laki masih didominasi oleh simbol falik. Karena itu, patriarki dan juga kapitalisme harus dihapuskan untuk secara sungguh-sungguh memanusiakkan masyarakat.⁴⁷

Mitchell juga mengembangkan teori tentang peran gender dalam pembentukan identitas individu. Individu dipaksa untuk memenuhi peran gender yang ditetapkan oleh masyarakat, yang menyebabkan mereka merasa terikat pada peran-peran tersebut dan merasa tidak nyaman dengan peran-peran yang dianggap tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka. Mitchell menekankan pentingnya memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih peran-peran yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan menentang pemaksaan peran gender yang ditentukan oleh masyarakat. Karya Juliet Mitchell telah memiliki dampak yang signifikan dalam bidang

⁴⁷ *Ibid*, 175-177.

psikologi sosial dan studi gender, dan terus mempengaruhi pemikiran dan aksi feminisme sampai sekarang. Menurut Mitchell, ia menuliskan argumennya bahwa penindasan wanita berhubungan dengan empat struktur sosial penting, diantaranya; produksi, reproduksi, seksualitas dan sosialisasi. Mitchell menggabungkan kritik pemikiran sosialis dan analisis psikoanalisis terhadap teori feminis yang merupakan salah satu upaya paling awal untuk menjadikan feminisme interdisipliner dan secara terang-terangan politik (terutama dalam ketergantungannya pada marxisme).⁴⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan studi literatur. Penulis melakukan beberapa langkah dan strategi untuk mendapatkan hasil dan temuan penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya berdasarkan prosedur penelitian. Langkah awal yang penulis lakukan yaitu memetakan *research question*, kemudian melakukan eksplorasi dan mencari beberapa data terkait gerakan protes politik gender Yaman pada revolusi Arab Spring dan kaitannya dengan ruang publik politik di Yaman yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2020.

Data yang otentik dan aktual didapatkan atas apa yang terjadi dalam masa revolusi *Arab Spring*, khususnya pada penggulingan rezim Saleh di Yaman. Selain itu, penulis mengambil data penelitian dalam

⁴⁸ Juliet Mitchell, *Woman's Estate*, (London: Verso, 2015), 41.

referensi primer terkait topik perempuan Yaman, politik protes, *public shpere* atau ruang publik, kesalehan perempuan, serta feminisme marxis sosialis dalam konteks terjadinya demonstrasi besar-besaran di Yaman. Sedangkan referensi sekunder yakni beberapa berita, situs website, informasi dari media sosial, baik Instagram maupun Twitter yang memuat beberapa informasi penting untuk menunjang data dan literatur sehingga data yang didapat valid dan mampu menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tidak hanya buku-buku yang menjadi bahan referensi dalam penelitain ini. Akan tetapi, juga data-data dari beberapa jurnal dan laporan penelitian yang menjadi bahan penunjang dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelaborasi data dan penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki kebaruaran. Dalam menganalisis bagaimana gerakan politik protes dan ruang publik di Yaman, penulis menggunakan konsep *public sphere* Jürgen Habermas, politik kesalehan perempuan Saba Mahmood dan feminisme marxis sosialis Juliet Mitchell. Selanjutnya, penulis mengolah data-data yang telah diperoleh dengan pendekatan *critical reading*. Ketika analisis data selesai, maka tahap selanjutnya adalah membaginya ke dalam variabel untuk memudahkan dalam menganalisis masalah dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Tahap terkahir ialah menarasilan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan tahapan yang rigid dan komprehensif. Sehingga, hasil temuan penelitian mampu dibaca dan

dipresentasikan dalam hasil penelitian yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang diharapkan secara komprehensif dapat menjelaskan seluruh isi tulisan awal sampai akhir penelitian. Pembagian bab ini dibagi menjadi lima bab, dengan masing-masing isi pembahasan dari tiap babnya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis dan metodologi penelitian. Poin-poin tersebut sangat penting untuk dimasukkan dalam bagian pendahuluan sebagai penjabar arah penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini membahas mengenai problematika riset serta perdebatan-perdebatan akademiknya demi melihat pentingnya posisi permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini diantaranya mengenai kondisi politik Yaman pasca *Arab Spring*, munculnya politik protes berdasarkan pada orientasi gender dan masa transisi pemerintahan presiden Manshour Hadi sebagai upaya menyuarakan ketidak-adilan gender di ruang publik serta harapan mereka untuk para perempuan di Yaman. Kemudian penulis juga memaparkan jenis strategi protes melalui sosial media yang muncul dari gerakan feminis Yaman.

BAB III: Pada bab ini menjelaskan tentang proses internalisasi nilai-nilai kesalehan perempuan serta kesadaran dari aktivis perempuan untuk mengekspresikan diri ke ruang publik karena otoritarianisme pemimpin dan patriarkisme yang tinggi. Selain itu, penulis menambahkan berbagai munculnya gerakan feminis Yaman dalam berbagai platform sosial media yang dianalisis menggunakan teori ruang publik Jürgen Habermas. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan penelitian pertama.

BAB IV: Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengaruh internalisasi nilai kesalehan perempuan yang meliputi analisis teori ruang publik dan feminisme dalam membangun diskursus perlawanan dan protes dari perempuan Yaman mengenai pemerintahan dan sistem politik. Berbagai kendala dan rintangan pada agenda pemberdayaan dihadapi oleh perempuan Yaman. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan penelitian kedua.

BAB V: Bab ini merupakan bab kesimpulan dari hasil pembahasan yang terkait dengan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran dan rekomendasi penelitian selanjutnya ketika membahas penelitian sejenis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesetaraan Gender dianggap kontroversial dalam banyak masyarakat konservatif, seperti Yaman, karena berkaitan dengan nilai-nilai agama dan budaya, peran sosial pria dan wanita, serta dinamika kekuasaan berbasis gender dalam masyarakat. Selain tradisional dan dominasi laki-laki, Yaman juga dikenal sebagai negara yang penuh konflik. Gerakan perempuan Yaman mengekspresikan bentuk protes politik gender dengan cara berdemonstrasi di ruang publik Yaman serta melakukan kampanye di media sosial untuk menyuarakan hak-hak perempuan. Gerakan feminis Yaman hadir di tengah konflik Yaman karena terdapat dampak kolektif dari kurangnya pembangunan dan patriarki lebih keras pada perempuan daripada laki-laki, dan akibatnya, situasi perempuan Yaman dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi terus mengkhawatirkan menurut indikator pembangunan internasional.

Pemimpin perempuan Yaman dipilih untuk dua alasan utama: a) keterlibatan langsung mereka sebagai alat dalam strategi pemberdayaan dan kebijakan perempuan, dan b) karena mereka adalah pelopor agenda feminis di Yaman. Para perempuan ini merupakan data empiris tentang dinamika kebijakan pemberdayaan perempuan, dan wawasan mereka tentang kesetaraan gender di dalam dan di luar posisi resmi mereka menyediakan pemahaman yang tak ternilai tentang isu yang diteliti. Munculnya gerakan feminisme yang menyuarakan hak-

hak perempuan berpengaruh pada negosiasi konflik Yaman dalam politik gender negara

Penulis menemukan hal menarik bahwa politik protes gender di ruang publik Yaman dapat mendobrak keberanian perempuan Yaman untuk melawan tradisi dan hukum patriarkis. Akibat dari politik protes gender tersebut, pemerintah Yaman membuat kebijakan pemberdayaan perempuan untuk menjalin relasi gender yang seimbang. Para feminis Yaman juga didukung oleh para donor untuk melaksanakan proyek pemberdayaan. Walaupun pemberdayaan perempuan Yaman banyak menemukan kendala besar, namun para pemimpin perempuan yang gigih dan pemberani tetap menjalankan proyek agenda mereka. Proyek pemberdayaan yang tidak berkelanjutan tersebut dikarenakan kurangnya dukungan politik dari segala kalangan, khususnya kalangan masyarakat konservatif. Maka melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa internalisasi politik kesalehan/ketundukan perempuan (*politic of piety*) dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Yaman konservatif dengan cara tidak menggunakan istilah yang dianggap Barat seperti gender, melainkan dengan istilah keadilan sosial, dan menggunakan banyak prinsip Islam untuk mendukung proyek pemberdayaan perempuan.

B. Saran

Beberapa ulasan dan penjelasan penelitian ini bukan akhir dari pembahasan. Namun, persoalan ini harus diteliti dan diperdalam lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang otentik dan komprehensif. Beberapa literatur

dan referensi yang sesuai dengan penelitian yang beragam juga akan menambah perspektif dan pembahasan yang luas, terutama mengenai gerakan feminisme Yaman dan identitas post-Arab Spring yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, permasalahan penelitian yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini pada dasarnya sangat luas dan beragam, tetapi penulis berusaha memfokuskan pada pembahasan gerakan feminisme dan politik protes gender di Yaman post-Arab Spring, terutama pada kurun tahun 2011-2020. Karena keterbatasan data-data dan eksplorasi penulis, maka penulis masih belum mengkaji lebih jauh terkait persoalan di Yaman yang kompleks. Tidak hanya itu, keterbatasan waktu dan beberapa faktor juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan penelitian ini.

Riset selanjutnya terkait tema dan problem penelitian yang dibahas dalam penelitian ini harus terus dilakukan untuk perbaikan penelitian ini. Terlebih mengenai dinamika politik Yaman post-Arab Spring pasca tahun 2011, dimana berbagai gejolak politik Yaman juga terus dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran dan telaah yang komprehensif membahas tentang permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, persoalan gerakan feminisme dan politik protes gender yang dinamis, maka perlu adanya usaha memperbarui referensi dan data, serta situasi dan kondisi yang terjadi dalam lanskap politik Yaman mutakhir. Untuk itu, penulis mengharapkan usaha penyempurnaan atas keterbatasan tesis dan menjadi bahan perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Ali, N. S., *Women's Movements in the Middle East: Case Studies of Egypt and Turkey*. United Nations Research Institute for Social Development, 2002. 19-31.
- Al-Sakkaf, Nadia. *Of ambition, opportunity, and pretence The Politics of Gender in Yemen*. International Relations and Economics, 2019.
- Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD). *Claiming Rights, Claiming Justice: A Guidebook On Women Human Rights Defenders*. Bangkok: APWLD, 2007.
- Boudet, Muñoz A.M., P Petesch dan C. Turk. *On Norms and Agency: Conversations about Gender Equality with Women and Men in 20 Countries*. The World Bank, 2013.
- Burdah, Ibnu. *Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Kajian Dunia Arab dan Islam Kontemporer, UIN Sunan Kalijaga. 2020. 33-39.
- Butler, Judith. *Bodies That Matter: On The Discursive Limits of "Sex"*. New York: Routledge, 1993. 89-98.
- Charles, Bressler. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th ed*. Pearson Education. 2007.
- Collier, P. *The bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can be Done About it*. UK: Oxford University Press, 2008.
- Cruz, C. Y. O. "Empowerment of Women During Conflict and Post-Conflict Phases and The Role of Humanitarian Aid Organizations in Supporting Women's Newfound Empowerment Gained During Conflict". Master Tesis, University of Geneva. 2016.
- El-Bushra, J dan E. P. Lopez. *Development in Conflict: The Gender Dimension*. UK: Oxfam GB, 1999.
- Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM. 2002.
- Habermas, Jürgen. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yudi Santoso (terj.). Yogyakarta: Kreasi wacana, 2007.

- Herbert, S. *Links Between Women's Empowerment (Or Lack Of) and Outbreaks of Violent Conflict*. UK: University of Birmingham, 2014.
- Hovden, Eirik. *Susanne Dahlgren, Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen*. New York: Syracuse University Press, 2010.
- Lund, Emily M., Claire Burgess dan Andy J. Johnson (eds.). *Violence Against LGBTQ+ Person Research, Practice, and Advocacy*. Switzerland: Springer Nature, 2021.
- Mahmood, Saba. *Politics of Piety: the Islamic Revival and the feminist subject*, UK: Princeton University Press. 2005.
- Manea, E. *The Arab State And Women's Rights: The Trap Of Authoritarian Governance*. Francis: Routledge Studies in Middle Eastern Politics, 2010. 116-121.
- McConnell, A. *Understanding Policy Success: Rethinking Public Policy*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Mitchell, Juliet. *Woman's Estate*. London: Verso, 2015.
- Narayan, D., dkk. *Voices of the poor: Crying out for Change*. New York: Oxford University Press for the World Bank, 2000.
- Nurwani. *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Pilcher, Jane dan Imelda Whelehan. *Fifty Key Concepts in Gender Studies*. London: SAGE Publication, 2006. 123-124.
- Randall, V. dan Waylen, G. (eds.). *Gender, politics and the state*. Routledge, 2012.
- Rhode, D. L. *The difference" difference" makes: Women and leadership*. California: Stanford University Press, 2003.
- Robertson, Graeme B. *The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in Post-Communist Russia*. New York: Cambridge University Press. 2012.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Komprehensif Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra, 2017. 175-175.
- Tucker, Judith (ed.). *Arab Women: Old Boundaries, New Frontiers*. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1993. 30-45.

United Nations Development Programme. *Towards the Rise of Women in the Arab World*. New York: Arab Human Development Report, 2006.

Wikan, Unni. *Behind the veil in Arabia: Women in Oman*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Jurnal:

Aharony, N. "Twitter Use By Three Political Leaders An Exploratory Analysis", *Emerland Online Information Review* 36 (4) Tahun 2012, 587-603.

Ajizah, Nur dan Khomisah. "Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender". *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies*, Tahun 2021. 12-16.

Alim, Ashari Sakti dan Dian Eka Rahmawati. "Komunikasi Politik Anies Baswedan Melalui Sosial Media Twitter". *Jurnal Acaademia Praja*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, 443.

Al-Sakkaf, Nadia. "Yemen's Women and The Quest for Change". *Political Participation after the Arab Revolution*, Friedrich-Ebert-Stiftung. Tahun 2012.

Amin, Saidul. "Pasang Surut Gerakan Feminisme". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2013. 148-160.

Anshari, Faridhian. "Komunikasi Politik di Era Media Sosial", *Jurnal Komunikasi*, 8(1) Tahun 2016. 91-101.

Antoinette, Sossou Marie. "We Don't Enjoy Equal Politics Rights: Ghanaian Women's Perceptions on Political Participation in Ghana". *Sage Open*. Vol I No. 9 Tahun 2011.

Besley, T., J. G. Montalvo, dan M. Reynal-Querol. "Do Educated Leaders Matter?". *The Economic Journal*, Vol 121, Tahun 2011. 554-560.

Bhasuki, Alvis Rahman, dkk. "Perang Saudara di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif dan Prospek Resolusi Konflik". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume IX Nomor 1 Juni 2019.

Bovens, M. "A Comment on Marsh and McConnell: Towards a Framework for Establishing Policy Success". *Public Administration*, 88(2), Tahun 2010.

Claire, Colebrook. "Incorporeality: The ghostly body of metaphysics". *Body and Society*. Tahun 2000.

- Eltantawy , Nahed. “From Veiling to Blogging: Women and Media in the Middle Eastern”. *Jurnal Feminist Media Studies*. Volume 13 Nomor 5 Tahun 2013.
- Fahrudin dan Habib Akbar. "Proxy War dalam Konflik Yaman". *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*. Volume 18, No. 1, Maret 2012.
- Fatanti, Megasari N. “Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet”. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 16 No. 1 Juni 2014, 17-28.
- Fuadi, Ahmad. “Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi”. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Tahun 2017.
- Gressmann, Wolfgang. “From The Ground Up: Gender and Conflict Analysis in Yemen”. *Published by Oxfam GB for Oxfam*. Oktober 2016.
- Hatem, M. F. “Economic and Political Liberation in Egypt and The Demise of State Feminism”. *International Journal of Middle East Studies*. 24(2), 1992. 231-243.
- Hussein , Douaa. “ Legal Reform As A way To Women’s Right: The Case Of Personal Status Law In Yemen”. *OIDA International Journal of Sustainable Development* . Tahun 2011.
- Indriana , Nilna. “Pemetaan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik). *An-Nas: Jurnal Humaniora*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Markham, S. “Women as Agents of Change: Having Voice in Society and Influencing Policy”. *Women’s Voice, Agency and Participation Research Series* No 5, Tahun 2013.
- McConnell, A. “Policy Success, Policy Failure and Grey Areas in-between”. *Journal of Public Policy*, 30(3), Tahun 2010.
- Mursyidah. “Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender”. *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 5, No. 2. Desember 2013. 28-34.
- Muttaqien , Muhammad Zainal. “Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah”. *Nation State Journal of International Studies*. Vol. 1 No. 2 Desember 2018.
- Nasrullah, Rulli. “Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas”. *Jurnal Komunikator*, Vol. 4 No.1 Mei 2012. 27-29.

- Newman, J. "Measuring Policy Success: Case studies from Canada and Australia". *Australian Journal of Public Administration*, 73(2), Tahun 2014. 192-202.
- Prasetyo, Antonius Galih. "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 2, November 2012 (169-185).
- Putra, Rizki Pratama, Maryam Jamilah, dan Poppy Irawan. "Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah". *Jurnal PIR*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Rohwerder, Brigitte. "Conflict and Gender Dynamics in Yemen". Institute of Development Studies K4D (Knowledge, evidence and learning for development, *UK Department for International Development and other Government departments*. Tahun 2017: 3-4.
- Ruslin, Ismah Tita. "Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)". *Jurnal Politik Profetik*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Shalihah, Febriani Amalina dan Hasan Sidik. "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan".
- Sihite, Agustianty Debora. "Upaya International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagi Perempuan Di Konflik Yaman", *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 6 (3), 2018, 1153-1168.
- Skolnick, Jerome H. "The Politics of Protest: Violent Aspects of Protest Confrontation". Volume 3 *NCCPV staff study series*, United States National Commission on the Causes and Prevention of Violence.
- Sreberny, A. "Television, Gender, And Democratization In The Middle East". dalam J. Curran & M. Park, *DeWesternizing media studies*. Routledge: 2000.
- Strzelecka, E. "Gender And Islam In Development Policy And Practice In Yemen". *Arabian Humanities, Revue internationale d'archéologie et de sciences sociales sur la péninsule Arabique/International Journal of Archaeology and Social Sciences in the Arabian Peninsula*. Tahun 2013.
- Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki". *MUZAWAH*, Volume 7, No 2, Desember 2015. 120 - 127.

- Tajali, M. "Women's Rise to Political Office on Behalf of Religious Political Movements". *Women and Gender in Middle East Politics*. (The Project on Middle East Political Science (POMEPS). 2016.
- Taufiq, Firmanda dan Rahmat Linur. "Realisme dan Konflik Timur Tengah dalam Kesusastran Arab". *Nady al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2021.
- Yadav & A. C. Clark. "Disappointments and New Directions: Women, Partisanship, and The Regime in Yemen". *HAWWA: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 8 (1), Tahun 2010. 65-73.
- Yadav. "Antecedents of The Revolution: Intersectoral Networks and Post-Partisanship in Yemen". *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 11(3), Tahun 2011.
- _____. "Does a Vote Equal a Voice? Women in Yemen". *Middle East Report*. Oktober 2009.

Situs dan lainnya

- Albadawi, W. "This is What Happened to Me". *Lahj News*. <http://www.lahjnews.net/news/news-13981.htm> . Diakses 16 Desember 2022.
- Al-Deen, M. Shuja. "What a Houthi-Controlled Yemen Means for Women". *Almonitor*. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/yemen-women-activists-revolution-houthis-saleh.html>. 18 Maret 2015.
- Aldoubai, S. "Aden's Rising Wave of Conservatism". *The Yemen Times*. <http://www.yementimes.com/en/1775/report/3770/Aden%E2%80%99s-rising-wave-of-conservatism.htm>. 28 April 2014.
- Al-Faqih, Abdullah. "The Yemen Uprising: Imperatives for Change and Potential Potential Risk (ARI) (2011)". https://www.files.ethz.ch/isn/ENGLISHANDSPANISH_ARI58-2011_Al-faqih_Yemen_Uprising_Change_Risk.pdf. Diakses 5 Agustus 2022.
- Bayoumy, Y. "Yemeni Women Fear Houthis are Restricting Freedoms". *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/us-yemen-women-idUSKBN0JW1QN20141218>. Diakses 16 Desember 2022.
- BBC News. "Presiden Yaman Mundur Setelah 33 Tahun". https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/02/120227_yemenpresident . Diakses 22 oktober 2022.

- Hahn, Julia. “Perempuan Yaman Sebagai Motor Aksi Protes”. <https://www.dw.com/id/perempuan-yaman-sebagai-motor-aksi-protos/a-15369341>. Diakses 11 September 2021.
- Ismail, Syarif dan Wadham College. “Unification in Yemen: Dynamics of Political Integration 1978-2000”. <http://users.ox.ac.uk/metheses/IsmailThesis.pdf>.
- Kalfood, M. A.. “In Yemen, Saudi-led Intervention Gives Rise to New Armed Religious Faction’. *The Intercept*. <https://theintercept.com/2016/04/26/in-yemen-saudi-led-intervention-gives-rise-to-new-armedreligious-faction/> . 26 April 2016.
- Khairunnisa, Jiehan. “Tawakul Karman: Pejuang Hak-Hak Perempuan di Yaman”, dalam https://www.kompasiana.com/jiehankhairunnisa7828/5db901c8d541df5d6973e972/tawakul-karman-pejuang-hak-hak-perempuan-di-yaman?page=2&page_images=1. Diakses 1 November 2022.
- Laessing, U. “Women of Southern Yemen Port Remember Better Times’. *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/us-yemen-women-idUSTRE60L2ZD20100122> , (22 Januari 2010). Diakses 16 Desember 2022.
- Nashihuddin, Wahid. “Public Sphere Menurut Jürgen Habermas” <https://pustakapUSDokinfo.wordpress.com/2019/09/23/public-sphere-menurut-jurgen-habermas/> , 23 September 2019.
- Nasser, A. “Yemen is Experiencing Two Revolutions, Says Female Activist”, *CNN*, (November 2011). <http://edition.cnn.com/2011/11/17/opinion/yemen-revolution-afrah-nasser/> . Diakses 16 Desember 2022.
- Oxfam International. <https://asiasociety.org/id/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-toolkit/stakeholders/organisasi-masyarakat-sipil-csolembaga-swadaya-masyarakat-ngo/internasional/oxfam-international>. Diakses 28 Desember 2022.
- Raja, J. A. “Yemeni Women in Transition: Challenges and Opportunities”. CDDRL Working Papers 140, Center on Democracy, Development, and The Rule of Law, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University, https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Number_140_Yemen.pdf

- Rumah Kitab. "Tantangan Perempuan Yaman". <https://rumahkitab.com/tantangan-perempuan-yaman/> . Diakses tanggal 22 Desember 2022.
- Sollich, Rainer. "Porträt der jemenitischen Friedensnobelpreisträgerin Tawakul Karman". <https://www.dw.com/id/ibu-revolusi-yaman-tawakkul-karman/a-15445385>. Diakses tanggal 22 Desember 2022.
- Syeed, Nafeesa. "Keadaan Perempuan Yaman Memburuk Pasca Revolusi". <https://www.voaindonesia.com/a/keadaan-perempuan-yaman-memburuk-pasca-revolusi/1513541.html> . Diakses 11 Oktober 2021.
- Taufiq, Firmada dan Lalu Wahyu Putra Utama "Hegemoni Amerika Serikat terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman Pasca *Arab Spring* 2011-2017 <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i1.2>
- Tobing, Melati Mediana. "Pemikiran Tokoh Filsafat Komunikasi". Diktat Ilmu Komunikasi UKI Jakarta, Agustus 2017. http://repository.uki.ac.id/1104/1/2016_UKI_Habermas_Ruang%20Publik.pdf
- Trading Economics. "Yemen GDP Per Capita" (2017). <https://tradingeconomics.com/yemen/gdp-per-capita-1/1/2017>. Diakses 5 agustus 2022.
- Transkrip wawancara Ginny Hill dengan Tawakul Karman. " A Democratic Future for Yemen". https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Meetings/Meeting%20Transcripts/16_211karmanQ&A.pdf. 16 Desember 2011.
- United Nations Development Programme. *Towards the Rise of Women in the Arab World*. New York: Arab Human Development Report, 2006. <http://www.arabhdr.org/reports/2005/english/ahdr2005e.pdf?download> . Diakses 17 Desember 2022.
- Yustiana, Kurnia. "Tawakul Karman: Muslimah Pejuang HAM yang Raih Nobel Perdamaian". <https://www.haibunda.com/trending/20200507200611-93139098/tawakkul-karman-muslimah-pejuang-ham-yang-raih-nobel-perdamaian>. Diakses tanggal 22 Desember 2022.